

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Enam puluh lima tahun sudah Indonesia merdeka. Namun masih ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum bisa merdeka secara utuh. Era reformasi yang awalnya dijadikan sebagai harapan untuk mengawal sebuah perubahan, sampai sekarang belum juga menampilkan greget yang menjanjikan. Pendidikan di Indonesia semakin tidak jelas ideologi dan identitasnya. Banyak data-data hasil penelitian lembaga internasional yang konsen di bidang sumber daya manusia dan pendidikan. Dari hasil tersebut sangat jelas terlihat perkembangan masing-masing negara, baik untuk kemajuan masing-masing negara maupun kemerosotan.

Diakui atau tidak, bahwa potret pendidikan yang sekarang ini bukanlah potret yang sempurna. Pendidikan kita sangat jauh dari harapan. Potret pendidikan di Indonesia masih sarat dengan wajah-wajah buram, dan karena itu menimbulkan berbagai kekecewaan. Ada jurang yang lebar antara tujuan yang ideal dan realitas di lapangan. Berikut ini adalah data-data hasil penelitian dari beberapa lembaga internasional yang konsen terhadap pendidikan dan sumber daya manusia. Fenomena yang tidak menyenangkan ini bisa menjadi bahan kajian dalam kerangka membangun pendidikan yang lebih bermutu, beradab, dan beridentitas ke-Indonesia-an.

Berdasarkan laporan *Human Development Index (HDI)*/ *Indek Pembangunan Manusia Indonesia* yang dibuat oleh *United Nation Development Programme (UNDP)* tahun 2009, Indonesia tergolong kategori *Medium Human Development*, berada pada peringkat ke 111 dengan nilai 0,734 dari 158 negara, di bawah Brunei Darussalam 0,920 (urutan ke 30), Singapura 0,944 (urutan ke 23), Malaysia 0,829 (urutan ke 66), Filipina 0,751 (urutan ke 105), Thailand 0,783 (urutan ke 87) yang sesama negara

ASEAN.¹ Index pembangunan manusia di Indonesia berada di bawah negara-negara tetangga. Ketika dilihat dari tahun kemerdekaannya pun Indonesia bisa dikatakan paling awal dibanding dengan yang lain.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, “melek” huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.² Jadi dari hasil pengukuran Index Pembangunan Manusia dapat kita lihat negara-negara yang tergolong maju, negara berkembang atau negara terbelakang. Indonesia tergolong negara berkembang berdasarkan pengukuran IPM, selain itu juga dapat digunakan dalam pengukuran di bidang pendidikan.

Pada konteks pembangunan pendidikan guru menempati posisi yang paling sentral. Guru merupakan jantungnya pendidikan. Kebijakan pembaharuan secanggih apapun yang dikeluarkan, tanpa peran aktif guru maka akan sia-sia. Sebagus apapun kurikulum dengan perencanaan strategi yang matang tanpa didukung kualitas guru, maka tidak akan ada gunanya. Ini berarti pendidikan yang baik dan unggul juga bergantung pada mutu guru.

UNESCO dalam laporan *The International Commission on Education for Twenty-first Century*, yakni "memperbaiki mutu pendidikan pertama-tama tergantung perbaikan perekrutan, pelatihan, status sosial, dan kondisi kerja para guru; mereka membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, karakter personal, prospek profesional, dan motivasi yang tepat jika ingin memenuhi ekspektasi *stakeholder* pendidikan" (Jacques Delors, 1996). Karena itu, upaya meningkatkan mutu, profesionalisme dan kesejahteraan para guru adalah suatu keniscayaan.³ Dalam hal ini mutu guru di Indonesia patut kita perhatikan

¹ “Human Development Index”, <http://hdr.undp.org/en/statistics/>.

² “Indek Pembangunan Manusia” http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index.

³ Irwan Prayitno Datuk Rajo Bandaro Basa, “Komitmen Anggaran Untuk Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Guru” <http://1195641999/komitmen-anggaran-peningkatan-mutu-dan-kesejahteraan-guru/htm>.

karena berkenaan dengan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian bagaimana kondisi para guru di Indonesia saat ini ?

Keadaan guru di Indonesia juga cukup memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan adalah sebagai berikut: untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta), untuk SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta).⁴ Dapat kita amati dalam prosentasi guru yang layak mengajar, tidak ada yang mencapai 80%, lalu bagaimana dengan setengah dari kualitas guru yang dikatakan dengan guru yang tidak layak mengajar?.

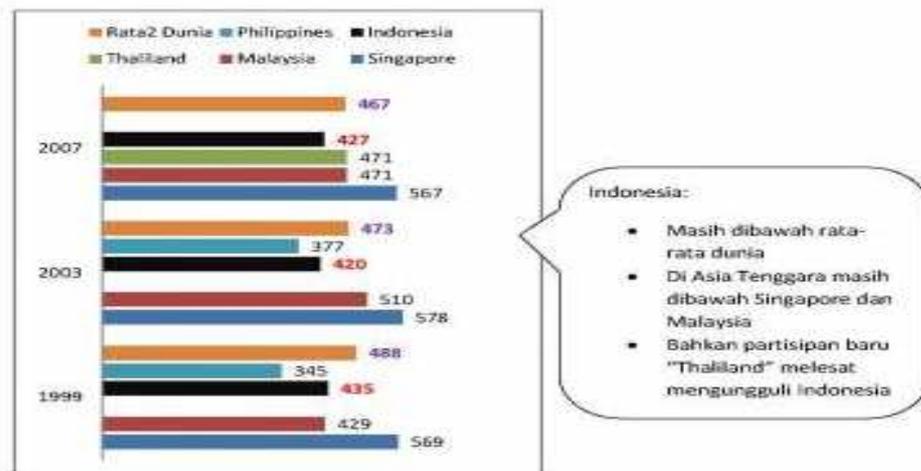
Kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Berdasarkan Data Balitbang Depdiknas (1998) menunjukkan dari sekitar 1,2 juta guru SD/MI hanya 13,8% yang berpendidikan diploma D2-Kependidikan ke atas. Selain itu, dari sekitar 680.000 guru SLTP/MTs baru 38,8% yang berpendidikan diploma D3-Kependidikan ke atas. Di tingkat sekolah menengah, dari 337.503 guru, baru 57,8% yang memiliki pendidikan S1 ke atas. Di tingkat pendidikan tinggi, dari 181.544 dosen, baru 18,86% yang berpendidikan S2 ke atas (3,48% berpendidikan S3).⁵

Penelitian terhadap kualitas pendidikan dasar juga dilakukan oleh *Asian South Pacific Beurau of Adult Education (ASPBAE)* dan *global campaign for education*. Studi ini dilakukan di 14 negara pada bulan Maret-Juni 2005, yang dipublikasikan pada bulan Juni 2005, khususnya yang menyangkut aspek kualitas input/ pengajar/ guru, Indonesia diberi nilai E dan menduduki peringkat paling buncit. Indonesia sudah dua tahun 2003 dan 2007 ini prestasi sains di TIMSS memalukan, selalu kalah dengan Negara Palestina, negara yang sedang berkecamuk perang. Tahun 2003 Palestina berada di

⁴ Meilani Kasim, "Masalah Pendidikan di Indonesia" <http://ganis.student.umm.ac.id/2010/01/26/mahalnya-biaya-sekulah-di-masa-sekarang/>.

⁵ Muhammad Amirullah, "Rendahnya Mutu Pendidikan di Indonesia" <http://ayomipale.blogspot.com/2010/09/rendahnya-mutu-pendidikan-di-indonesia.html>.

urutan 34 Tahun 2007 ada di urutan 34. Bandingkan dengan Indonesia 2003 di urutan 36, 2007 di urutan 41. Gambar-gambar berikut ini bisa menjadi cerita⁶



Grafik di atas menurut *Trend in Mathematic and Science Study* (TIMMS) 2003, siswa Indonesia hanya berada di ranking ke 35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika. Prestasi ini jauh di bawah Singapura dan Malaysia. Untuk nilai penguasaan atas ilmu pengetahuan berdasarkan tes yang diselenggarakan di bawah payung organisasi *Association for Evaluation of Educational Achievement Internasional* (AAEI), kembali menempatkan para siswa Indonesia pada urutan ke 36 di bawah Malaysia dan Singapura, bahkan partisipasi baru "Thailand" mengungguli Indonesia.⁷ Jelas sekali grafik yang menunjukkan prestasi Indonesia dalam bidang sains. Lagi-lagi Indonesia berada di bawah negara-negara tetangga. Selain di bidang sains juga masih banyak data lain yang menjadi pengukuran tingkat pendidikan di Indonesia.

Menurut laporan bank dunia (Greaney, 1992), studi *Inetrnasional Association* (IEA) di Asia Timur, menunjukkan bahwa ketrampilan membaca siswa kelas IV SD berada pada peringkat terendah. Rata-rata

⁶ Herlanti, "Prestasi Sains Indonesia di TIMMS" <http://yherlanti.wordpress.com/2009/01/17/prestasi-sains-indonesia-di-timms/>.

⁷ *Ibid.*

skor tes membaca untuk siswa SD: 75,5 (Hongkong), 74,0 (Singapura), 65,1 (Thailand), 52,6 (Filipina), 51,7 (Indonesia). Anak-anak Indonesia hanya menguasai 30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran.⁸

Sederet data-data yang telah disajikan di atas tentang angka statistik pendidikan di Indonesia, tentunya banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di negara kita. Dimulai dari kurikulum, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kualitas guru, lembaga pendidikan yang kurang memadai dari segi fisik. Tentunya harus ada pembenahan yang harus ditempuh demi perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kurikulum pendidikan yang senantiasa bersifat dinamis, menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan supaya dapat memantapkan hasil belajar. Itulah sebabnya harus diadakan perbaikan kurikulum, akan tetapi perbaikan tersebut tidak selamanya dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Kurikulum tahun 1964 merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, kemudian diganti dengan kurikulum 1975 yang ternyata malah muncul masalah baru. Kurikulum dinilai menghasilkan lulusan yang sekolah yang tidak siap pakai, karena tidak memiliki kualifikasi ketrampilan yang cocok untuk menangani lowongan kerja, dan akhirnya banyak yang menganggur.⁹ Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengangguran di Indonesia. Patut dipertanyakan ketika semakin banyak lulusan malah semakin banyak pengangguran.

Angka pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2002, pengangguran mencapai 11,5-11,6%. Untuk tahun 2004, pengangguran sekitar 9,8% dan tahun 2005 sebesar 10,3%. Sekali lagi menumpuknya pengangguran ini bersumber pada sistem pendidikan yang lemah.¹⁰

⁸ Sujono Samba, *Lebih Baik Tidak Sekolah*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), Cet. 1, hlm. 12.

⁹ Ali Rohmad, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), Cet. 2, hlm. 45.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 15.

Kualitas lembaga pendidikan yang rendah berimplikasi pada lulusan suatu lembaga tersebut. Tingkat pengangguran Indonesia di antara negara-negara ASEAN paling tinggi. Pada tahun 2006, data menunjukkan bahwa sekitar 3 juta sarjana Indonesia berstatus pengangguran, akibat belum tertampung oleh lapangan pekerjaan.¹¹ Pertanyaan yang muncul adalah mengapa para sarjana ini menganggur? Fenomena ini tidak bisa lepas dari sistem pendidikan kita yang mengutamakan aspek kepintaran teoritis verbalis dengan mengesampingkan kreatifitas dan kekaryaan.

Dapat kita rasakan bersama di semua tingkatan pendidikan. Apakah pendidikan kita cenderung menciptakan generasi yang individualis dan tidak memiliki kepekaan sosial? Sehingga sangat gagap sekali ketika dihadapkan dengan realitas kehidupan masyarakat yang beragam dan kompleks dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi. Perlu adanya kajian ulang terkait dengan komponen-komponen pendidikan yang menjadi penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia.

Pendidikan hakikatnya membebaskan pada ketergantungan. Peserta didik bukan diposisikan sebagai objek pembelajaran, dan dididik sebagai konsumen (dalam istilah ekonomi). Tetapi peserta didik ditempatkan sebagai produsen yang siap bersaing ketika ia telah lulus atau telah menyelesaikan studinya di bangku sekolah maupun di bangku kuliah.

Dari berbagai permasalahan di atas kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia dengan berbagai cara. Antara lain dikeluarkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 yang mengatur tentang Guru dan Dosen, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Program Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.

¹¹ Sujono Samba, *op.cit.*, hlm. 12.

Di dalam Undang-undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Jadi apabila guru telah memiliki atau pun menguasai keempat kompetensi tersebut, maka guru dimaksud sejatinya dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan mandiri dan sebaik mungkin.¹² Kebijakan itu berlaku tidak hanya guru yang ada di bawah naungan Mendiknas, tetapi untuk para guru yang di bawah naungan Kementerian Agama juga. Mengingat madrasah-madrasah juga menjadi pilihan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan formal.

Di dukung dengan mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, madrasah seharusnya sangat diminati oleh masyarakat secara luas. Jenjang yang harus ditempuh pun sama dengan di sekolah umum. Madrasah Ibtidaiyah setara dengan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah setara dengan Sekolah Menengah Pertama, madrasah Aliyah setara dengan Sekolah Menengah Atas. Mata pelajaran yang diajarkan madrasah pun tidak hanya mata pelajaran umum, tetapi mata pelajaran agama menjadi menu wajib yang harus ada pada sebuah madrasah. Namun sangat ironis ketika madrasah yang menjadi pusat pembelajaran khususnya agama justru banyak menuai kontroversi. Tentu saja tidak terlepas dari berbagai permasalahan seperti pendidikan yang ada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional.

Keberadaan Madrasah Ibtidaiyah didasarkan pada keputusan Menteri Agama RI no. 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah (MI) tanggal 22 Desember 1993 eksistensi Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan Sekolah Dasar. Tujuan dilaksanakannya MI dinyatakan dalam BAB II pasal 2 ayat 1 yakni: pertama, mendidik manusia agar menjadi muslim dan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan pancasila. Kedua, memberi bekal kemampuan yang diperlukan murid untuk melanjutkan ke

¹² Nazarudin Rahman, *Regulasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2009), Cet. 1, hlm. 37.

jenjang yang lebih tinggi. Ketiga, memberi kemampuan dasar untuk hidup dalam masyarakat dan mengembangkan kemampuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan lingkungan.¹³ Tujuan yang tertuang dalam BAB II pasal 2 ayat 1 tersebut mengarahkan siswa kepada kebutuhan yang dihadapi pada masa tersebut dan menyiapkan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan siswa untuk kebutuhan masa depannya sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan serta lingkungannya.

Madrasah Ibtidaiyah merupakan pendidikan dasar yang diperoleh anak atau peserta didik. Setiap anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan penambahan usianya. Terkait dengan perkembangan anak, meminjam teori Piaget, telah menjelaskan bahwa tahapan-tahapan perkembangan kognitif anak terdiri dari 4 fase, yaitu:

- a. Sensori motor yang berkembang dari mulai lahir sampai umur 2 tahun
- b. Pra-operasional, mulai dari umur 2 sampai 7 tahun
- c. Operasional konkret, berkembang dari umur 7 sampai 11 tahun
- d. Operasional formal, yang dimulai dari umur 11 sampai 14 tahun ke atas¹⁴

Tahapan-tahapan seperti itu seharusnya dapat dijadikan landasan bagi seorang guru sebagai *key person* dalam proses belajar mengajar, untuk menentukan materi, metode, dan pendekatan yang tepat bagi peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan dan kemampuan mereka pada usia-usia tertentu.¹⁵ Jangan sampai guru salah menentukan materi atau kurikulum, metode dan pendekatan yang seharusnya diberikan untuk anak dewasa, atau sebaliknya. Karena hal ini akan berakibat fatal, yaitu gagalnya suatu proses belajar mengajar dan tersumbatnya potensi-potensi peserta didik memasuki taraf-taraf perkembangannya. Pada dataran pendidikan dasar, Sekolah Dasar (SD) setara dengan Madrasah Ibtidaiyah

¹³ Ali Riyadi, *Politik Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2006), Cet. 1, hlm. 94.

¹⁴ Syamsul Ma'arif, *Selamatkan Pendidikan Dasar Kita*, (Semarang: NEED'S Press, 2009), Cet. 1, hlm. 82.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 83.

(MI) merupakan lembaga pendidikan formal yang ditempuh siswa untuk tahap awal.

Menurut catatan Departemen Agama (2007), sekarang Kementerian Agama, jumlah MI sebesar 23.517 lembaga, 93 persen di antaranya swasta; MTs. 12.054 lembaga, 90 persen diantaranya swasta, dan Madrasah Aliyah sebesar 4.687 lembaga, 86 persen diantaranya swasta.¹⁶ seperti yang telah dikatakan di awal, terkait dengan sederet peringkat yang diperoleh Indonesia dari hasil pengukuran melalui HDI/IPM Indonesia tergolong negara berkembang dan banyaknya permasalahan yang berkecamuk di Indonesia lebih khususnya pada bidang pendidikan. Banyaknya pengangguran yang tercatat merupakan sebuah problem atas lembaga pendidikan yang telah menghasilkan lulusan. Di Indonesia terdapat dua payung pendidikan, yakni di bawah naungan Kementerian Agama dan di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional.

Madrasah yang merupakan fokus kajian dalam penelitian ini merupakan pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Salah satu problem besar yang dihadapi madrasah di Indonesia ialah belum optimalnya favorit masyarakat terhadap lembaga madrasah itu sendiri. Jangankan menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk "memadrasah-kan" (menyekolahkan) putra-putrinya atau istilahnya menjadi "*institution of choice*", sedangkan anggota masyarakat yang sama sekali belum mengenal madrasah pun masih banyak. Ini lucu, karena eksistensi madrasah di Indonesia sudah puluhan tahun; jadi tidak dapat disebut "bayi kemarin sore".¹⁷

Memang benar, di kalangan tertentu, utamanya kalangan pesantren, minat masyarakat terhadap madrasah sangat tinggi. Angka statistiknya pun telah menunjukkan tingginya jumlah madrasah di Indonesia. Namun demikian, secara nasional tingkat favorititas masyarakat terhadap madrasah

¹⁶ Ki Supriyoko, "Mengurangi Problem Kemadrasahan" <http://supriyoko.wordpress.com/2010/10/27/problem-madrasah.htm/>.

¹⁷ *Ibid.*

lebih rendah dibandingkan dengan sekolah umum. Problem kedua menyangkut lebih rendahnya prestasi akademis "ilmu umum" siswa madrasah dibandingkan dengan sekolah. Sependapat atau tidak, banyak warga nahdliyin yang membedakan pengetahuan, ilmu, dan keterampilan menjadi dua, yaitu "ilmu umum", seperti matematika, kimia, dan teknologi informasi (TI), serta "ilmu agama", seperti membaca Al-Qur'an, memahami hadist, dan tarikh. Secara hipotesis, lebih rendahnya prestasi akademis "ilmu umum" siswa madrasah dibandingkan dengan sekolah inilah yang menyebabkan lebih rendahnya tingkat favoritas masyarakat terhadap madrasah dibandingkan dengan sekolah umum. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabnya sederhana saja, yaitu karena kurikulum madrasah hanya berisikan 70 persen "ilmu umum", sedangkan kurikulum sekolah berisikan 100 persen "ilmu umum" dengan asumsi mata pelajaran pendidikan agama tidak diperhitungkan.¹⁸ Masih ada perbedaan antara ilmu umum dengan ilmu agama yang kemudian dijadikan sebuah pertimbangan oleh masyarakat. Banyaknya madrasah di Indonesia khususnya di Jawa Tengah hendaknya menjadi sebuah perhatian khusus yang harus ditangani oleh pemerintah terkait dengan pendidikan di Indonesia.

Data Kementerian Agama wilayah Jawa Tengah tahun 2009 mencatat bahwa guru Madrasah Ibtidaiyah sejumlah 36870 dengan jumlah MI 3769 lembaga. Dalam data tersebut yang tercatat sebagai PNS sejumlah 8035, non PNS 28835. Sedangkan guru yang dinyatakan lulus sertifikasi berjumlah 3736 guru. Dari data tersebut, Kabupaten Kudus tercatat bahwa guru PNS berjumlah 155, non PNS 1593 guru, yang lulus sertifikasi 131 guru. Sedangkan di Kecamatan Jekulo hanya tercatat 14 guru MI yang sudah lulus sertifikasi kuota 2008-2009.¹⁹ Padahal setiap kecamatan di Kabupaten Kudus bisa dibuat rata-rata kurang lebih ada 7-13 lembaga Madrasah Ibtidaiyah.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Kabid MAPENDA Kantor Wilayah Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah.

Masyarakat di Kecamatan Jekulo tergolong religius dengan adanya pondok pesantren yang banyak didirikan oleh para sesepuh dan para kyai. Lembaga madrasah baik dari tingkat RA/ TK, MI/ SD, MTS/ SMP, MA/ SMA sudah ada tersedia di Kecamatan Jekulo. Baik dari sekolah umum maupun agama secara seimbang banyak diminati oleh masyarakat. Bahkan tidak hanya dari daerah setempat, namun dari berbagai penjuru daerah pun datang untuk menimba ilmu di daerah tersebut. Cukup dipandang kharismatik Kecamatan Jekulo dalam hal pendidikan yang disediakan untuk masyarakat. Dalam hal menjaga kearifan lokal warga masyarakat di Kecamatan Jekulo juga cukup memegang tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dalam bermata pencaharian pun sangat beragam, dari mulai petani, penambang, guru, pedagang, sopir dan masih banyak lagi profesi yang lain.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri berbagai permasalahan seperti yang diuraikan di atas, dialami pula oleh madrasah yang ada di Kecamatan Jekulo. Ketika berbagai problem itu dibiarkan tanpa ada pemecahan sama sekali maka kehancuran dan sia-sia kerja keras yang telah dilakukan oleh para komite sekolah untuk memperbaiki kualitas pendidikan ketika tidak diimbangi dengan penyelesaian problem-problem yang menimpa madrasah tersebut.

Berdasarkan data yang saya peroleh dari Kementerian Agama Kabupaten Kudus, saat ini, di Kecamatan Jekulo terdapat 14 guru Madrasah Ibtidaiyah yang telah mendapatkan sertifikat pendidik melalui program sertifikasi, kuota 2008/ 2009 dari LPTK Rayon 6 IAIN Walisongo Semarang.

Sangat mengejutkan ketika program sertifikasi yang digalakkan oleh pemerintah ternyata masih sangat minim partisipasi dari para guru. Namun setidaknya ada respon dan perhatian dari para guru untuk mengikuti program sertifikasi. Selanjutnya, setelah mengikuti sertifikasi, setidaknya ada perubahan yang diharapkan oleh pemerintah dan para *stakeholder* sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh

pemerintah. Yakni 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Kompetensi paedagogik merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang guru. Sekaligus yang akan menjadi bahan kajian dalam pembahasan kali ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kompetensi paedagogik guru pasca lulus sertifikasi guru ?
2. Bagaimana persepsi para *stakeholder* (guru, pengawas, kepala madrasah) terhadap kompetensi paedagogik guru pasca lulus sertifikasi guru ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui tingkat kompetensi paedagogik para guru pasca lulus sertifikasi guru.
- b. Mengetahui persepsi dari para *stakeholder* terhadap kompetensi guru pasca lulus sertifikasi.

D. KERANGKA TEORI

Hampir setiap orang pernah mengalami pendidikan, tetapi tidak setiap orang mengerti makna kata pendidikan, pendidik, dan mendidik. Untuk memahami pendidikan ada dua istilah yang dapat mengarahkan pada pemahaman hakikat pendidikan, yakni paedagogi dan paedagogik. Paedagogi bermakna pendidikan, sedangkan paedagogik bermakna ilmu pendidikan.²⁰ Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila paedagogik atau ilmu

²⁰ M. Sukardjo dan Ukim Komarudin, *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 7.

mendidik adalah ilmu atau teori yang sistematis tentang pendidikan yang sebenarnya bagi anak atau untuk anak sampai ia mencapai kedewasaan.

Dalam realitas dunia pendidikan, paedagogi modern membagi fungsi pembelajaran menjadi tiga area, yakni apa yang dimaksudkan sebagai Taksonomi Bloom. Menurut Taksonomi Bloom, pengajaran terbagi atas: (1) bidang kognitif, yakni yang berkenaan dengan aktivitas mental, seperti ingatan pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan mencipta; (2) bidang afektif, yakni berkenaan dengan sikap dan rahasia diri; dan (3) bidang psikomotor yang berkenaan dengan aktivitas fisik, seperti ketrampilan hidup dan pertukangan.²¹

Guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Pribadi susila yang cakap adalah yang diharapkan ada pada setiap diri anak didik. Tidak ada seorang guru pun yang mengharapkan anak didiknya menjadi sampah masyarakat.²² Untuk itulah guru dengan penuh dedikasi dan loyalitas berusaha membimbing dan membina anak didik agar di masa mendatang berguna bagi nusa dan bangsa.

Emille Durkheim pernah melukiskan dua fungsi pendidikan yang saling bertentangan yaitu, pendidikan sebagai pembelenggu, dan pendidikan sebagai pembebas individu.²³ Pernyataan ini menarik, terutama terdapat pada fungsi pendidikan sebagai pembelenggu. Selama ini kebanyakan masyarakat hanya memahami fungsi pendidikan sebagai pembebas individu. Ternyata pendidikan bisa berfungsi sebaliknya, yaitu sebagai pembelenggu. Hal ini memberi pemahaman berikutnya bahwa pendidikan dapat menjadi “berbahaya” bagi kemandirian, kreativitas dan kebebasan siswa sebagai individu.

Pendidikan sebagai pembelenggu ini agaknya dapat dilacak dari model-model pembelajaran yang dilaksanakan guru di dalam kelas. Terkadang terdapat gejala-gejala perilaku guru dalam pembelajaran di kelas yang tidak

²¹ *Ibid.*, hlm. 8.

²² *Ibid.*, hlm. 34.

²³ Paulo Freire, *Politik Pendidikan dan Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 43.

konduif mengakibatkan daya kritis siswa, bahkan dalam batas-batas tertentu membahayakan masa depan siswa seperti sikap guru yang sinis terhadap jawaban yang salah, strategi pembelajaran yang monoton.

Hal demikian ini akan terjadi bila seorang guru tidak menguasai materi dan cenderung mengabaikan tugasnya sebagai seorang pendidik. Sebagai pendidik, guru dituntut untuk bisa mengajar dengan memiliki sifat dengan melibatkan aspek paedagogis, psikologis dan didaktis secara bersamaan.²⁴ Jika ketiga aspek ini dijalankan dalam kelas, maka pendidikan akan menjadi alat pembebas yang akan menjadikan siswa belajar dengan nyaman dan menyenangkan.

Mendidik adalah kata kunci dari pendidikan. Mengingat hal itu, sangat penting untuk dipahami hakikat mendidik bermakna luhur dalam proses pendidikan. Mendidik, menurut Langeveld, adalah mempengaruhi dan membimbing anak dalam usahanya mencapai kedewasaan. Ahli lainnya adalah Hoogveld mengatakan mendidik membantu anak supaya ia cukup cakap menyelenggarakan tugas hidupnya. Menurut tokoh pendidikan, seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Teori Peter G Beidler, dalam buku *inspiring teaching* yang diedit oleh John K Roth, terdapat 10 kriteria guru profesional, yaitu;²⁵

1. Seorang guru yang profesional harus benar-benar berkeinginan menjadi guru yang baik.
2. Seorang guru yang profesional berani mengambil resiko, mereka berani mengambil tujuan yang muluk, lalu mereka berjuang untuk mencapainya.
3. Seorang guru profesional memiliki sikap positif. Seorang guru tidak boleh sinis dengan pekerjaannya.
4. Seorang guru profesional selalu tidak pernah punya waktu yang cukup.

Menurut Bedler, bahwa para guru yang baik hampir bekerja antara 80-100

²⁴ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 67.

²⁵ Nazarudin Rahman, *op.cit.*, hlm. 65-68.

jam per minggu, termasuk hari Sabtu dan Minggu, isteri dan keluarganya mengeluh dengan alasan yang baik, bahwa mereka kurang peduli pada isteri dan keluarganya itu.

5. Guru yang profesional berfikir bahwa mengajar adalah sebuah tugas menjadi orang tua siswa, yakni guru mempunyai otoritas untuk mengarahkan siswanya sesuai basis kemampuannya.
6. Guru yang profesional harus selalu mencoba membuat siswanya percaya diri, karena tidak semua siswa memiliki rasa percaya diri yang seimbang dengan prestasinya.
7. Seorang guru yang profesional juga selalu membuat posisi yang tidak seimbang antara siswa dengan dirinya, yakni dia selalu dia menciptakan jarak antara kemampuannya dengan kemampuan siswanya.
8. Seorang guru yang profesional selalu mencoba memotivasi siswa-siswanya untuk hidup mandiri, lebih independen, khususnya untuk sekolah-sekolah menengah atau *collage*, mereka harus sudah mulai dimotivasi untuk mandiri dan independen.
9. Seorang guru yang baik tidak percaya penuh terhadap evaluasi yang diberikan siswanya, karena evaluasi mereka terhadap gurunya bisa tidak obyektif.
10. Seorang guru yang profesional senantiasa mendengarkan terhadap pernyataan-pernyataan siswanya, yakni guru itu harus aspiratif mendengarkan dengan bijak permintaan-permintaan siswanya, kritik-kritik siswanya, serta berbagai saran yang mereka sampaikan.

Dari uraian di atas, bahwa profesionalisme guru memang sangat dibutuhkan oleh para guru di tengah-tengah ketatnya persaingan di era globalisasi seperti sekarang ini. Profesionalisme tidak hanya karena faktor tuntutan dari perkembangan zaman, tetapi pada dasarnya juga merupakan suatu keharusan bagi setiap individu dalam kerangka perbaikan kualitas hidup manusia.

Secara umum guru harus memenuhi dua kategori yaitu memiliki *capability* dan *loyalty*, yakni guru itu harus memiliki kemampuan dalam

bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritik tentang mengajar yang baik, dari mulai perencanaan, implementasi sampai evaluasi, dan memiliki loyalitas keguruan, yakni loyal terhadap tugas-tugas keguruan yang tidak semata di dalam kelas, tetapi sebelum dan sesudah kelas. Gilbert H Hunt dalam bukunya *effective teaching* menyatakan bahwa guru yang baik itu harus memenuhi tujuan kriteria (Hunt, 1999: 15-16), yaitu :²⁶

1. Sifat; guru yang baik harus memiliki sifat-sifat antusias, simulative, mendorong siswa untuk maju, hangat, berorientasi pada tugas dan pekerjaan yang keras, toleran, sopan, dan bijaksana, bias dipercaya, fleksibel dan mudah menyesuaikan diri, bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar siswa, mampu menyampaikan perasaannya, dan memiliki pendengarannya.
2. Pengetahuan; guru yang baik juga memiliki pengetahuan yang memadai dalam mata pelajaran yang diampunya, dan terus mengikuti kemajuan dalam bidang ilmunya itu.
3. Apa yang disampaikan; guru yang baik juga memberikan jaminan bahwa materi yang disampaikan mencakup semua unit bahasan yang diharapkan siswa secara maksimal.
4. Bagaimana mengajar; guru yang baik mampu menjelaskan berbagai informasi secara jelas dan terang, memberikan layanan yang variatif, menciptakan dan memelihara momentum, menggunakan kelompok secara efektif, mendorong semua siswa untuk berpartisipasi.
5. Harapan; guru yang baik mampu memberikan harapan pada, siswa mampu membuat siswa akuntabel, dan mendorong partisipasi orang tua dalam memajukan kemampuan akademik siswanya.
6. Reaksi guru terhadap siswa; guru yang baik bisa menerima berbagai masukan, resiko, dan tantangan, selalu memberikan dukungan pada siswanya, konsisten dalam kesepakatan-kesepakatan dengan siswa, bijaksana terhadap kritik siswa, menyesuaikan diri dengan kemajuan-

²⁶ Nazarudin Rahman, *op.cit.*, hlm. 108-110.

kemajuan siswa, mampu memberikan jaminan atas kesetaraan partisipasi siswa.

7. *Management*; guru yang baik juga harus mampu menunjukkan keahlian dalam perencanaan, memiliki kemampuan mengorganisasi kelas sejak hari pertama dia bertugas, cepat memulai kelas, melewati masa transisi dengan baik, memiliki kemampuan dalam mengatasi dua atau lebih aktifitas kelas dalam satu waktu yang sama, mampu memelihara waktu bekerja serta menggunakannya secara efisien dan konsisten.

M. Furqon Hidayatullah mengutip pendapat Dryden dan Vos dalam buku karangannya yang berjudul *Guru Sejati; Membangun Insan Berkarakter Kuat dan Cerdas*, mengemukakan bahwa belajar seharusnya memiliki tiga tujuan, yaitu;²⁷

1. Mempelajari ketrampilan dan pengetahuan tentang materi-materi pelajaran spesifik.
2. Mengembangkan kemampuan konseptual umum, sehingga mampu belajar menerapkan konsep yang sama atau yang berkaitan dengan bidang-bidang lain yang berbeda.
3. Mengembangkan kemampuan dan sikap pribadi yang secara mudah dapat digunakan dalam segala tindakan.

Ada beberapa faktor penting yang mendukung keberhasilan belajar adalah ;²⁸

1. Guru yang berkompeten,
2. Pembelajaran yang berkualitas,
3. Fasilitas yang baik,
4. Kualitas kompetensi yang memadai di kelas,
5. Pasangan / partner belajar yang berkualitas,
6. Waktu belajar yang cukup,
7. Media pembelajaran, termasuk teknologi informasi dan komunikasi.

²⁷ M. Furqon Hidayatullah, *Guru Sejati: Membangun Insan Berkarakter Kuat dan Cerdas*, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2009), Cet. 2, hlm. 149.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 152.

Sardiman dalam mengutip pendapat Edi Suardi dalam bukunya *pedagogic*, merinci ciri-ciri interaksi belajar-mengajar yakni; memiliki tujuan, ada suatu prosedur (jalannya interaksi) yang direncana, ditandai suatu penggarapan materi secara khusus, ditandai dengan aktivitas, ada guru yang berperan sebagai pembimbing, membutuhkan disiplin dan ada batas waktu untuk pencapaian tujuan serta sudah barang tentu perlu adanya kegiatan penilaian.²⁹

Jadi dalam belajar memiliki banyak prinsip, antara lain harus aktivitas untuk menunjukkan potensinya, perlu motivasi, keadaan siswa perlu diperhitungkan. Tujuan belajar dari *instructional effects* dan *nurturant effect*. Belajar ditunjukkan untuk mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep dan ketrampilan, serta pembentukan sikap.

E. PENEGASAN ISTILAH

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman dalam kaitan dengan menafsirkan judul, maka perlu adanya beberapa penegasan istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu:

1. Kompetensi Guru

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi guru meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Jadi kompetensi guru adalah kemampuan profesional yang dimiliki oleh guru dalam melaksanakan tugas kependidikannya.

2. Kompetensi paedagogik

Kompetensi paedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

²⁹ Sardiman A.M., *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. 1, hlm. 55.

3. Profesional

Professional adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.

4. Sertifikasi Guru

Program sertifikasi pendidik adalah pemberian pengakuan guru profesional yang disertai peningkatan kesejahteraan bagi guru. Sertifikasi pendidik merupakan proses perolehan sertifikat pendidik bagi guru. Sertifikat pendidik bagi guru berlaku sepanjang yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikasi diperoleh melalui pendidikan profesi yang diakhiri dengan uji kompetensi. Dalam program sertifikasi telah ditentukan kualifikasi pendidikan bagi semua guru di semua tingkatan, yaitu minimal Sarjana atau Diploma IV.

F. PEMBatasan MASALAH

Adapun fokus penelitian ini dibatasi pada Guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Jekulo Kudus yang telah lulus sertifikasi guru pada kuota 2008 dan 2009. Di Kecamatan Jekulo Kudus ada 14 guru Sertifikasi lulus pada tahun angkatan 2008/ 2009 yang tersebar di enam madrasah ibtidaiyah.

G. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan CIPP *evaluation model*. model CIPP (*context, input, process, product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam dkk di Ohio State University.³⁰ Jadi dalam meneliti tentang Kompetensi Paedagogis Guru Pendidikan Agama Islam Pasca Sertifikasi Guru ini, peneliti sebagai evaluator dalam

³⁰ Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet. 3, hlm. 45.

mengevaluasi program, dengan cara menganalisis program berdasarkan komponen-komponennya.

1. Sumber data

Objek sasaran evaluasi adalah para guru yang lulus sertifikasi (guru yang telah mendapat sertifikat pendidik). Data utama dalam penelitian ini diambil berasal dari:

a. Observasi/ pengamatan

Observasi merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari biologis, psikologis. Dua diantaranya dengan proses pengamatan dan ingatan.

b. Wawancara

Merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek untuk dijawab. Dalam pelaksanaannya wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, di mana pewawancara membawa pedoman yang mengandung garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Dalam penelitian ini, metode wawancara ini digunakan untuk menggali data tentang persepsi murid dan para *stakeholder* mengenai guru yang telah bersertifikat pendidik. Responden utama dari penelitian ini adalah guru yang telah bersertifikat, kepala sekolah, pengawas, guru-guru sejawat dan komite sekolah.

c. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang bersifat pustaka yang digunakan sebagai landasan maupun kajian teoritis dan kerangka berfikir dalam penelitian ini. Adapun data-data yang dimaksud adalah teori-teori tentang profesionalisme guru, kompetensi guru.

2. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³¹

H. KAJIAN PUSTAKA

Beberapa kajian yang relevan dengan judul penelitian adalah buku karangan Masnur Muslih yang berjudul *Sertifikasi Guru menuju Profesionalisme Pendidik*. Adanya buku sertifikasi guru dan tenaga pendidik tentang seluk beluk sertifikasi guru. Buku ini juga berisi tentang alasan mengapa perlu adanya sertifikasi guru. Selain itu juga buku karangan Nazarudin Rahman yang berjudul *Regulasi Pendidikan*. Buku ini berisi tentang kriteria profesionalisme guru, kemampuan guru dalam menyampaikan ilmu yang diajarkan.

Sebelumnya, sudah dilakukan penelitian oleh Amin Farid dkk (2007) tentang *Respon dan Kesiapan Guru Madrasah dalam Menghadapi Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru (Studi di Kota Semarang)* yang didanai oleh Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian itu ditemukan pentingnya pembinaan dan pengembangan profesi guru, perlunya penghargaan dan jaminan perlindungan kerja guru serta pemberian hak-hak yang layak bagi guru. Para guru di Kota Semarang juga rata-rata menyatakan kesiapannya menghadapi program sertifikasi guru.

Penelitian ini mencoba mencari jawaban lain dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Di mana penelitian Amin Farid dkk hanya mencari jawaban respon guru sebelum sertifikasi, sedangkan penelitian ini akan mencari jawaban kemampuan para guru setelah lulus sertifikasi. Apakah ada peningkatan atau justru mengalami kemunduran.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, hlm. 335.